



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : I NENGAH DUWIJANA,
- 2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 3. NHK : 993181

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.175.000.000

- 1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
- 2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 198.000.000

- 1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
- 2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- 3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
- 4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
- 5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 582.173.673

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.955.173.673



III. HUTANG

Rp. 93.413.948

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.861.759.725

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.